



Calon Tersangka

Penyidik Kantongi Dua Nama

Perkara Dugaan Korupsi Kapal Bantuan KKP dan Pemprov Bali

DENPASAR, TRIBUN BALI - Setelah gelar perkara bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali, penyidik mengantongi nama calon tersangka dugaan korupsi proyek tujuh kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemprov Bali. Dua alat bukti sudah didapat untuk menetapkan tersangka.

Sumber internal di Kejati Bali yang namanya enggan disebutkan

menyatakan, sejatinya jaksa penyidik sudah mengantongi nama calon tersangka. Menurut sumber, calon tersangka berasal dari pejabat KKP dan Pemprov Bali. "Pokoknya minimal dua orang tersangkanya," ujar sumber, Kamis (26/1).

Asisten Pidana Khusus (Aspid-sus) Kejati Bali, Polin O Sitanggang menjelaskan, dengan adanya keterangan kerugian negara dari BPKP, maka penyidik mempunyai dua

alat bukti yang cukup menetapkan tersangka. Saat dikejar siapa calon tersangka yang dimaksud, Polin enggan menjawab terus terang, namun mengatakan gambaran tersangka sudah ada.

"Siapa yang akan jadi tersangka sudah ada angan-angan. Tapi, siapa itu harus menunggu hasil penyidikan selesai. Saya sih inginnya kalau bisa secepatnya (ada tersangka)," ujarnya.

Mengenai status kapal tersebut,

Polin akan menyita tujuh unit kapal yang kini bersandar di perairan Sumberkima, Gerogak, Buleleng. "Kapal sudah pasti kami sita sebagai barang bukti," ucapnya. Ditambahkannya, proyek bantuan kapal dengan nilai Pagu Rp 11 miliar ini didanai KKP dan Dinas Kelautan Provinsi Bali. Awalnya proyek ditangani Pemprov Bali. Namun, karena proyek macet di tengah jalan, Pemprov Bali akhirnya meminta bantuan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat akhirnya menyetujui. Sementara Pemprov Bali memberikan dana pendamping bantuan pusat. Disinggung kontraktor PT F1 Perkasa dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang mengerjakan kapal, Polin membenarkan. Tapi, pihaknya butuh data lengkap untuk mengetahui keterlibatan rekanan. "Inilah yang masih kami selidiki. Di mana letak terjadinya korupsi," terang Polin.

Diketahui, program bantuan

KKP dan Pemprov Bali ini sejatinya untuk nelayan di Buleleng, Badung dan Denpasar. Anggaran besar digelontorkan untuk membuat kapal dan membantu nelayan. Tujuannya untuk memudahkan nelayan dalam melaut. Namun, setelah kapal selesai, para nelayan di Buleleng menolak kapal tersebut. Karena kondisi fisik kapal yang tidak layak dan di bawah standar. Diduga terjadi di *mark-up* hingga merugikan negara ratusan juta rupiah. (can)

Edisi : Jumat, 27 Jan 2017

Hal : 5



Penyidik Perlu 3 Hari Pelajari Berkas

■ Pasca Penggeledahan di Kantor Travel dan Sekwan

DENPASAR, TRIBUN BALI – Berkas yang disita dari kantor Sekretariat dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar dan kantor travel masih dipelajari. Penyidik memerlukan waktu hingga tiga hari untuk mempelajari berkas-berkas tersebut.

"Paling tidak kami butuh waktu tiga hari untuk mempelajari dokumen yang kami bawa. Namun, karena libur panjang dokumen yang disita kami biarkan dulu dan nanti kami pilah dulu," ujar Kasi Intel Kejari Denpasar, IGA Kusumayasa Dipayuta, Jumat (27/1).

Puluhan dokumen yang disita tersebut baru dipelajari minggu depan setelah hari kerja aktif. Dijelaskan jaksa asal Tabanan ini, untuk mempelajari dokumen tim penyidik Pidsus setidaknya menyiapkan 10 jaksa. Dipelajari berkas itu untuk melengkapi pemberkasan tersangka mantan sekwan Rai Suta.

Lebih lanjut diterangkannya, jaksa penyidik ingin meneliti seluruh berkas dengan cermat. Hal itu guna melengkapi berkas tersangka I Gusti Rai Suta sebelum dilimpahkan ke pengadilan. "Jika kami menemukan berkas atau dokumen terkait, maka bisa masuk sebagai alat bukti. Dokumen yang tidak terkait akan kami kembalikan," jelas mantan Kasi Intel Kejari Singaraja itu.

Kusumayasa menambahkan, penggeledahan yang dilakukan kejaksaan resmi berdasarkan surat izin Pengadilan Negeri (PN) dan surat perintah Kepala Kejari Denpasar. Berkas tersangka Rai Suta sendiri tidak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Mengenai adanya tersangka baru, pihaknya menyatakan belum bisa memastikan. Lanjutan penyidik akan mempelajari semua dokumen yang dibawa, dan tengah fokus ke pemberkasan tersangka I Gusti Rai Suta.

Senin lalu tim Kejari Denpasar melakukan penggeledahan di Sekretariat Dewan Kota Denpasar. Dari penggeledahan di rumah rakyat itu, tim membawa sekitar 80 bendel berkas yang dimasukkan ke dalam koper, kardus juga kotak besar. Sedangkan penggeledahan di Bali Daksina Wisata Tour & Travel dan PT Sunda Duta Tour, tim jaksa Kejari Denpasar membawa sejumlah bundel dokumen yang terkait perjalanan dinas DPRD Kota Denpasar. (can)

Edisi : Sabtu, 28 Jan 2017

Hal : 5